

Profil Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2015



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
GAMBARAN UMUM	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	6
C. Sumber Daya	7
1. Susunan Kepegawaian	7
2. Kondisi Sarana dan Prasarana	9
3. Keuangan	10
D. Isu Strategis	10
E. Visi, Misi, dan IKU SKPD	14
1. Visi SKPD	14
2. Misi SKPD	15
3. IKU SKPD	15
PETA KINERJA SKPD	17
CAPAIAN KINERJA SKPD	18
A. Target dan Realisasi IKU Pemda	18
B. Target dan Realisasi IKU SKPD	19
C. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program	20
D. Target dan Realisasi SPM	22
E. Target dan Realisasi IKK	22
F. Target dan Realisasi Anggaran	23
PENUTUP	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



A large, red, stylized letter 'P' logo, likely representing the initials of the author or organization.

uji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2015.

Meningkatnya tuntutan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Dalam penyelenggaraan SAKIP, diperlukan data-data pendukung yang konsisten berkualitas, dan up to date. Adanya Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo diharapkan mampu mendukung SAKIP SKPD Bappeda Kulon Progo yang berkualitas dan terarah.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo tahun berikutnya sehingga penyusunan profil yang akan datang akan lebih baik lagi. Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wates, Maret 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala,

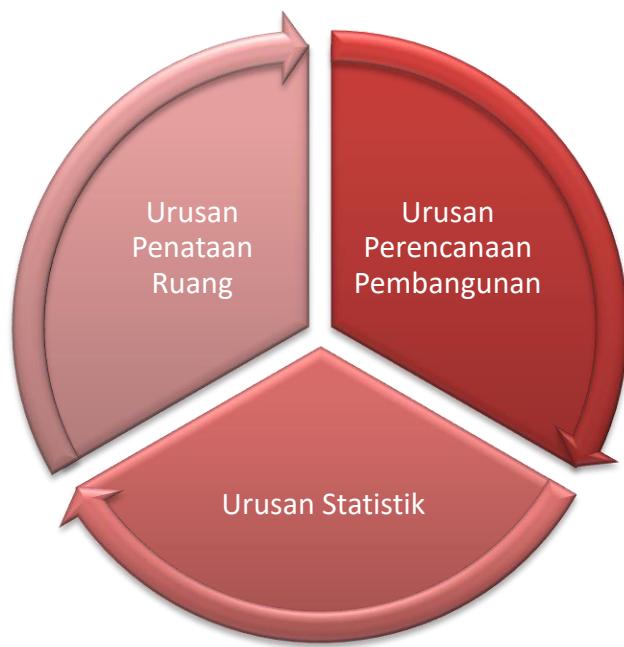
2015

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19610801 198903 1 005

GAMBARAN UMUM SKPD

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu:



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bappeda mempunyai tugas :



Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan serta administrasi keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan

melaksanakan penyusunan program kerja dan laporan

Sub Bagian Keuangan

melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan

2. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan

usaha kecil menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

- melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, dan penanaman modal

Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

- melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan

3. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

- menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan perumahan

Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

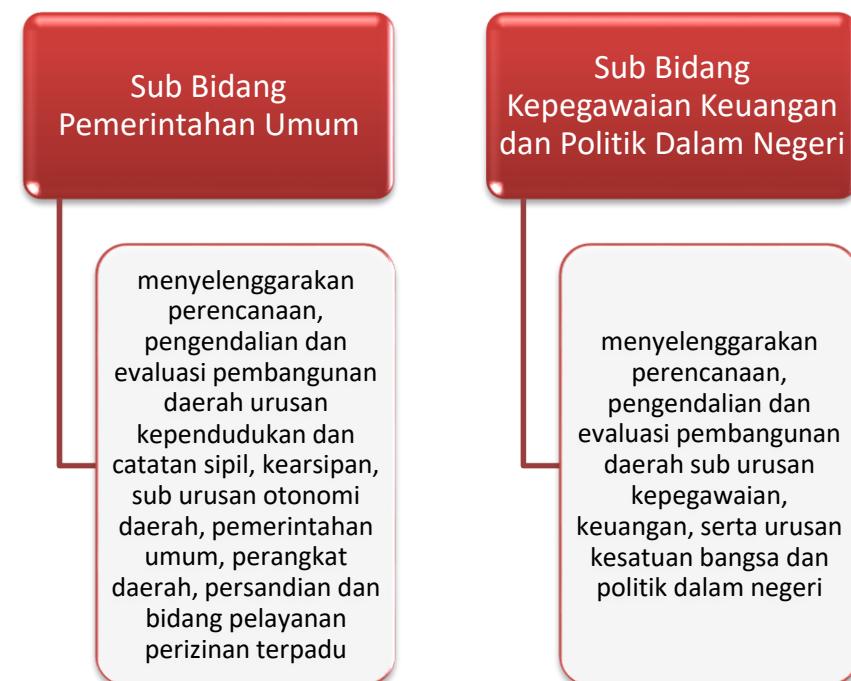
- melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan penataan ruang

Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

- menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup

4. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan dan bidang pelayanan perizinan terpadu.



5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesehatan.

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan

Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

- menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa

6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik.

Sub Bidang Perencanaan



- melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah

Sub Bidang Pengendalian



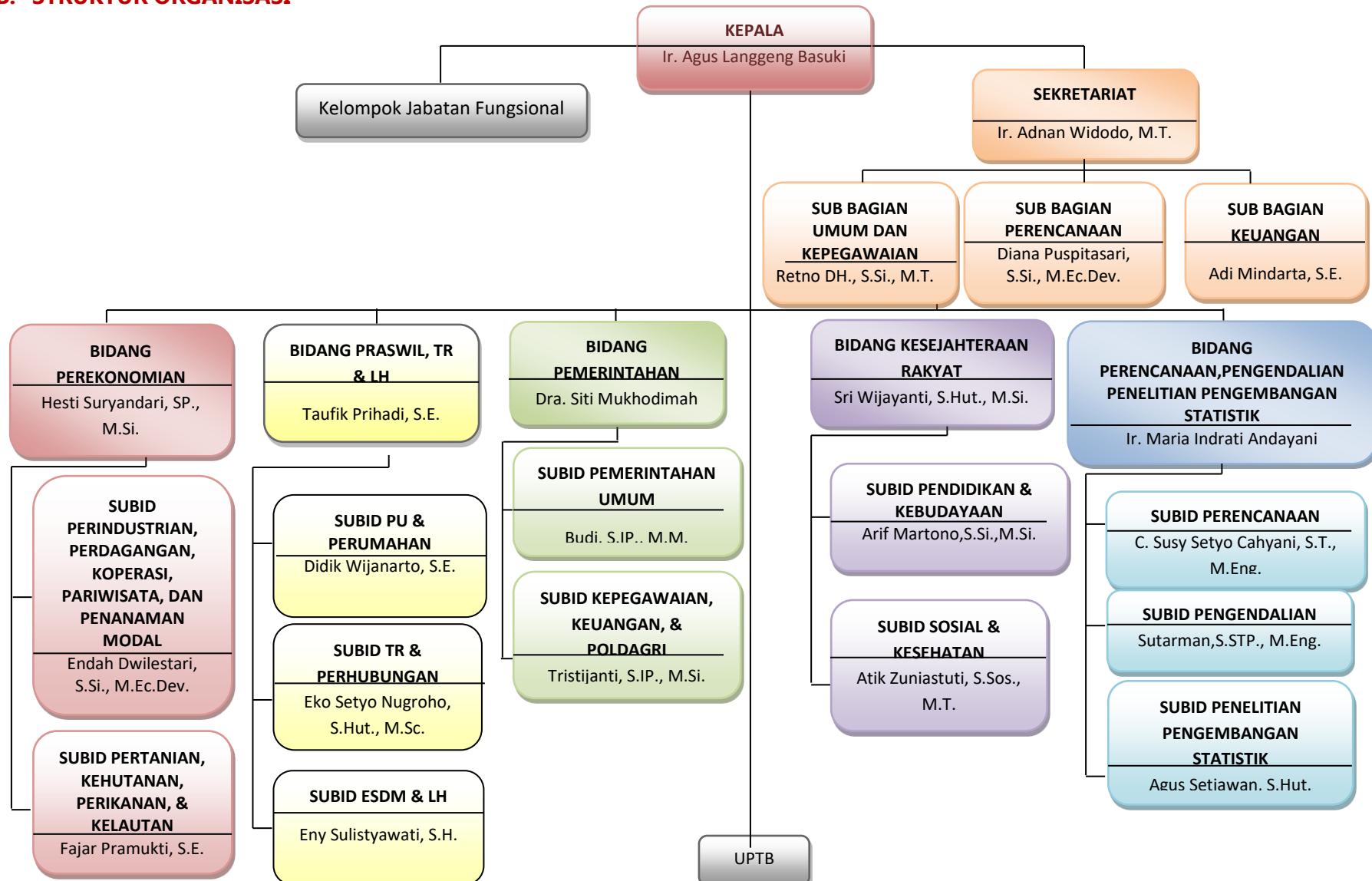
- pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik



- menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kegiatan pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan statistik

B. STRUKTUR ORGANISASI



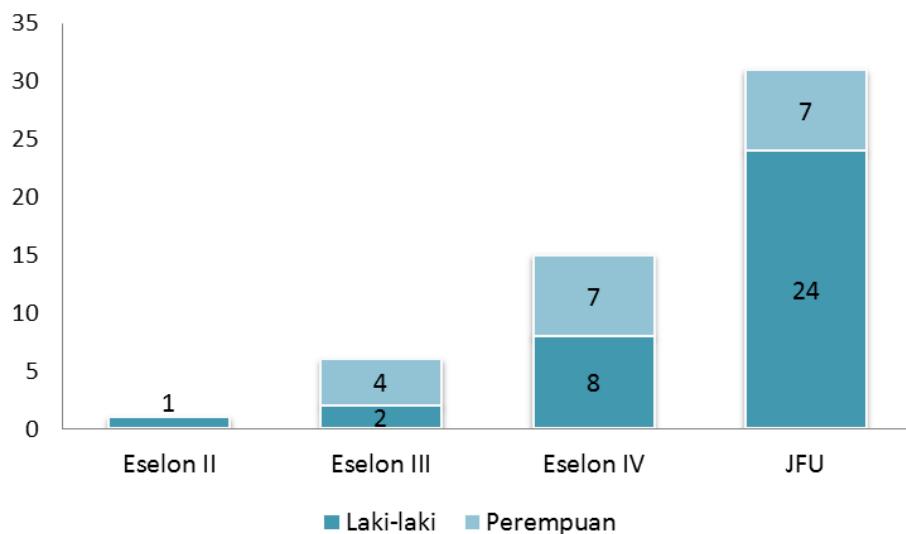
C. SUMBER DAYA

1. Susunan Kepegawaian

1.1. Kondisi riil pegawai

a. Pejabat Struktural

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon III terdiri dari 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Bappeda. Jumlah pejabat struktural dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Bappeda Kulon Progo dijelaskan pada gambar I.2 berikut:



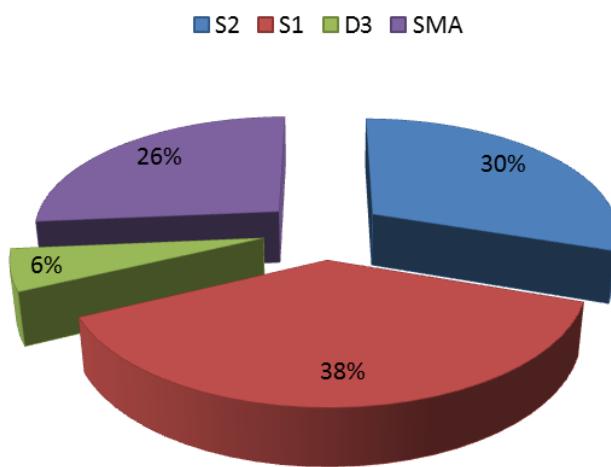
Jumlah Pejabat Struktural dan JFU Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Golongan

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut Golongan Pangkat

Unit	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala	-	-	1	1
Sekretariat	3	12	2	17
Bidang Perekonomian	-	4	1	5
Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	7	1	8
Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	3	2	5
Bidang Pemerintahan	-	3	3	6
Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik	-	9	2	11
Jumlah	3	38	12	53

c. Pendidikan

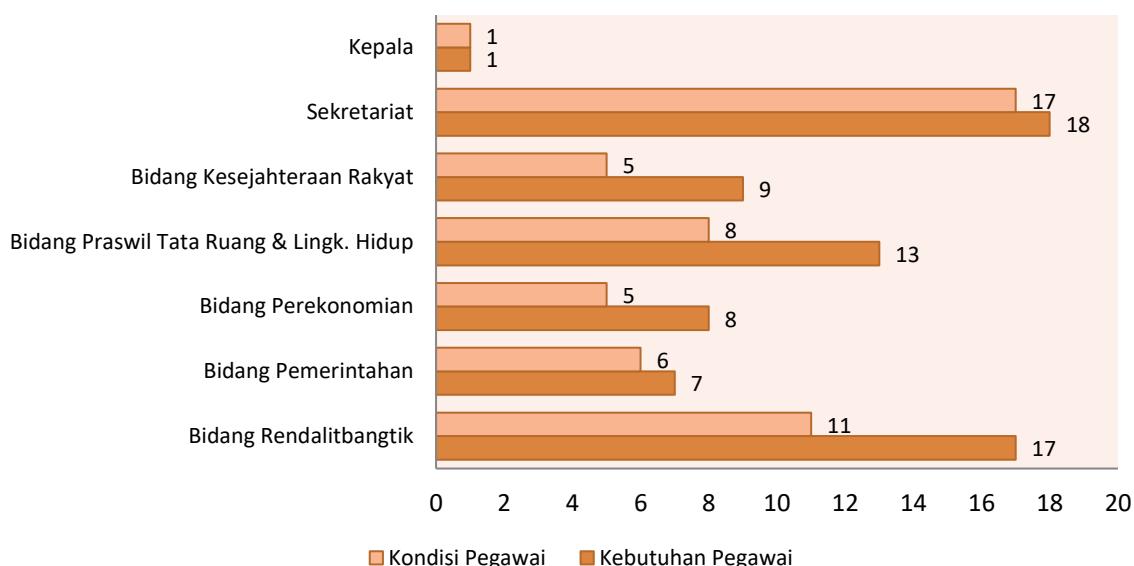


Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (20 orang atau 38%), diikuti oleh pendidikan S-2 (16 orang atau 30%), SMA (14 orang atau 26%) dan D-3 (3 orang atau 6%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo kurang memadai dalam segi kuantitas, namun cukup memadai dalam segi kualitas.

a. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan

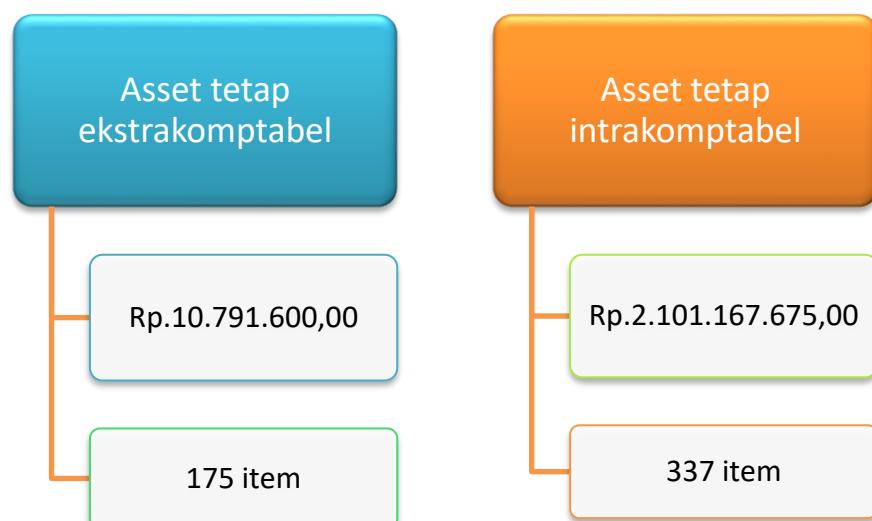
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka formasi kebutuhan pegawai Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:



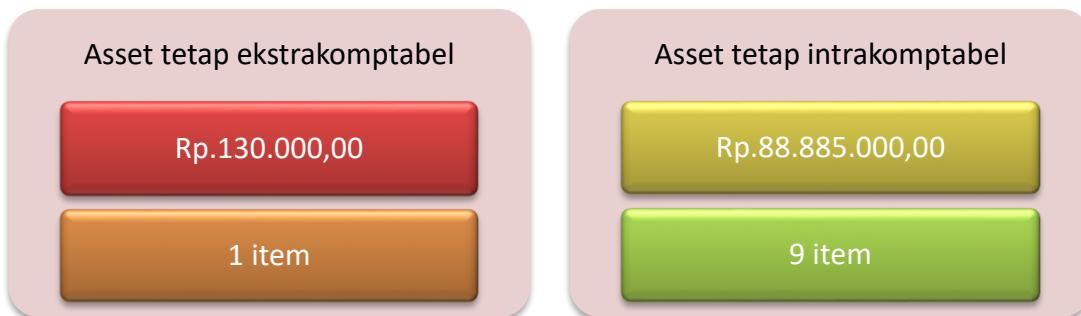
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kondisi pegawai di semua bidang Bappeda Kulon Progo masih berada di bawah jumlah kebutuhan pegawai.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:

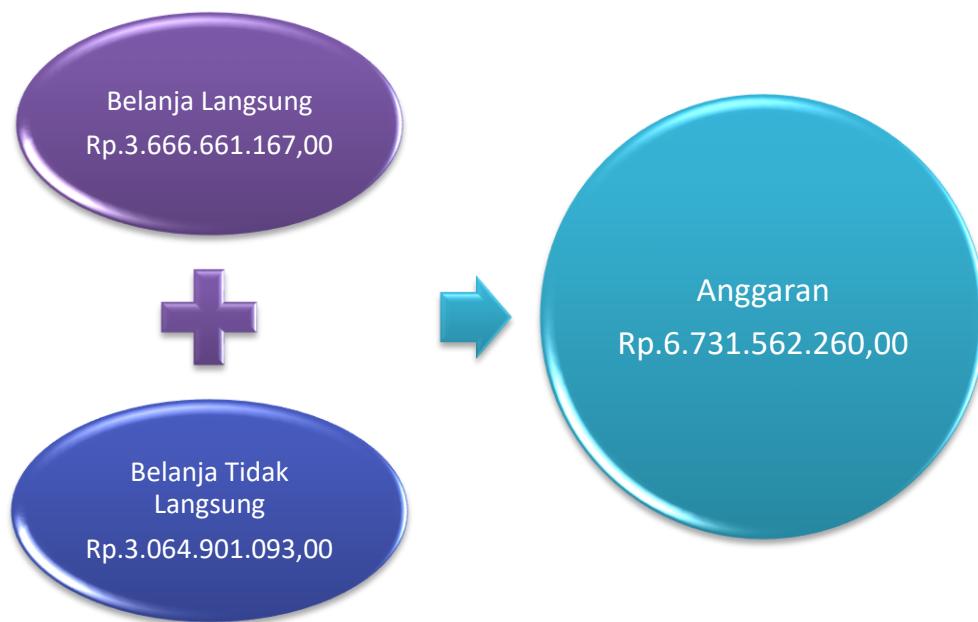


Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2015 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut:



3. Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kulon sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2015 Bappeda Kulon Progo mengelola anggaran sebagai berikut:



D. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai berikut:

- Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;

- Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana;
- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;
- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda
Kabupaten Kulon Progo**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan permohonan rekomendasi tata ruang • Perda DIY No. 2 Tahun 2010 • Perda KP No. 1 Tahun 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 26 Tahun 2007 • PP No. 8 Tahun 2013 • Permen PU No.11/PRT/M/2 009 • Permen PU No.20 Tahun 2011 • Permen PU No.01/PRT/M/2 013 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan agenda rakor BKPRD • Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan • Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan info/dokumen pemohon • Kesesuaian lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dokumen pendukung (RDTR)
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan 5 tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25 Tahun 2004 • PP No. 8 Tahun 2008 • Permendagri No.54 Tahun 2010 • Perda No. 14 Tahun 2007 • Perda No.16 Tahun 2007 • Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan <i>E-Plan</i> • Ketersediaan Sarana prasarana kerja • Kecermatan verifikasi • Kemampuan aparatur perencana • Kejelasan arahan unsur pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan • perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS • Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya hasil perencanaan • Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Kulon Progo No.2 Tahun 2012 • Perda No.16 Tahun 2012 • Perbup No.69 Tahun 2012 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda • Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY • Ketepatan dan Kecermatan Data dan Usulan 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data statistik • memberikan ijin KKN 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 • PP No.61 Tahun 2010 • Permendagri No. 8 Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecermatan aparatur • Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda • Ketersediaan SIM data statistik daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS • Ketersediaan data base SKPD • Konsistensi data 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan <i>up to date</i> • Data belum bisa diakses secara mudah oleh stakeholders
		<ul style="list-style-type: none"> • Perda No.16 Tahun 2012 • Perbup No.69 Tahun 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan menanggapi permohonan • Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan • Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan permohonan 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi penelitian pengembangan IPTEK kepada institusi dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda No.16 Tahun 2012 • Perbup No.69 Tahun 2012 	Inventarisasi penelitian/pemuan yang ada di Kulon Progo	Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian	Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat
Kajian terhadap Renstra SKPD Bappeda DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Bappeda DIY • Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25 Tahun 2004 • PP No. 8 Tahun 2008 • Permendagri No.54 Tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY 	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kewilayahan					
Kajian terhadap Renstra Kementerian PPN/ Bappenas	Kesesuaian produk perencanaan dengan peraturan di atasnya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2004 PP No. 8 Tahun 2008 Permendagri No.54 Tahun 2010 	Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan	Informasi kebijakan dari pemerintah pusat	Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS
Kajian terhadap RTRW	<ul style="list-style-type: none"> Telah memiliki Perda RTRW Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis Telah dicapai kesesuaian tata ruang 79,55% 	<ul style="list-style-type: none"> UU TR No.26 Tahun 2006 Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012 	Keterbatasan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya proses legislasi RDTR Kondisi eksisting pemanfaatan tata ruang Inkonsistensi penegakan Perda Kurangnya pemahaman masyarakat 	<p>Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi</p> <p>Pemanfaatan Tata Ruang</p>

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan, perkembangan Teknologi Informasi, dan lain-lain)	Penyusunan rencana pembangunan daerah tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku di pemerintahan pusat. Adanya perubahan landasan atau acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.	Terbatasnya SDM di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemda yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.	-
		Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.	Kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD-SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi <i>overload</i> .	

E. VISI, MISI, DAN IKU SKPD

1. Visi SKPD

Visi Bappeda adalah “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”. Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan.

- Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif, realistik,

luwes, didasari partisipasi dan komprehensif. Realistik berarti mendasarkan pemikiran yang objektif dan perhitungan masak serta berdasarkan fakta dan kondisi yang dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang, rasional berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan, dan komprehensif berarti perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

- Kulon Pogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah kondisi Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu berinovasi dengan etos kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung dengan tenang dan damai, terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Misi SKPD

Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

3. IKU SKPD

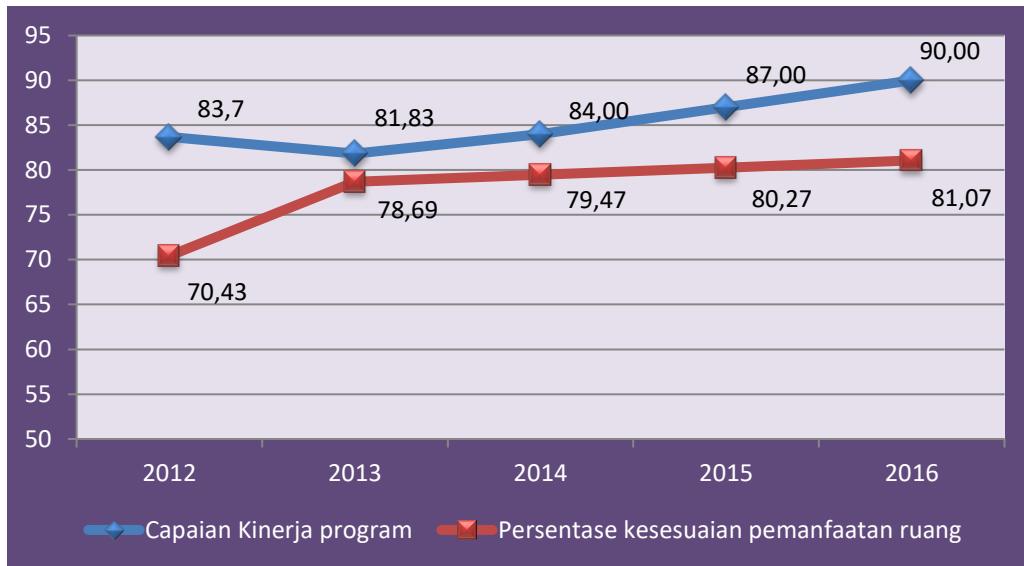
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.
2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran (IKU SKPD) serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU SKPD)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Meningkatnya kinerja perencanaan	Capaian kinerja program	83,70	81,83	84,00	87,00	90,00
2	Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	70,43	78,69	79,47	80,27	81,07



**Target Indikator Sasaran (IKU SKPD) Bappeda Kulon Progo(%)
Tahun 2012-2016**

Formula dari penghitungan IKU Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:

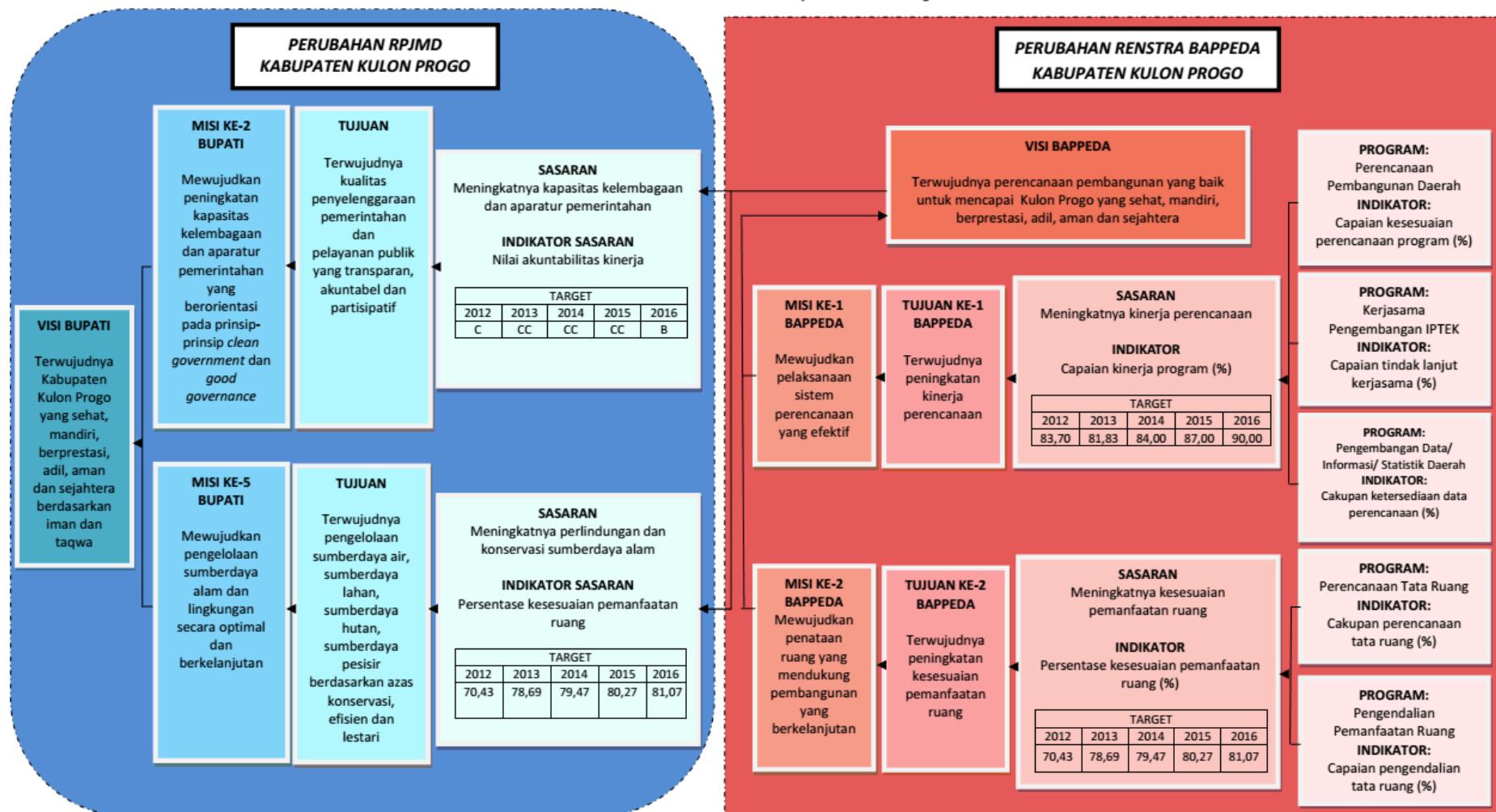
- a. Capaian Kinerja Program

$$\text{Capaian kinerja program} = \frac{\text{Jumlah presentase capaian program kabupaten}}{\text{Jumlah program}} \times 100\%$$

- b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

$$\text{Percentase kesesuaian pemanfaatan ruang} = \frac{\text{luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$$

PETA KINERJA SKPD



CAPAIAN KINERJA SKPD

A. TARGET DAN REALISASI IKU PEMDA

Adanya visi Bappeda Kulon Progo tidak terlepas dari adanya keinginan pencapaian visi Bupati Kulon Progo melalui sasaran dari misinya. Berkaitan dengan 3 urusan yang Bappeda Kulon Progo selenggarakan dan sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, Bappeda Kulon Progo mendukung ketercapaian 2 (dua) sasaran Pemerintah Daerah Kulon Progo yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Misi, Tujuan, Sasaran, dan IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo



Target dan realisasi IKU Pemda di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Target dan Realisasi IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA)	TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)								
			2012		2013		2014		2015		2016
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja	C	C	CC	B	CC	B	CC	(dicapai di tahun 2016)	B

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA)	TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)								
			2012		2013		2014		2015		2016
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
2	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	70,43	70,43	78,69	78,69	79,47	79,55	80,27	82,35	81,07

Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2015 belum ada dikarenakan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2015 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) baru akan disampaikan di tahun 2016.

B. TARGET DAN REALISASI IKU SKPD

Target dan realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Target dan Realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU PEMDA)	TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)								
			2012		2013		2014		2015		2016
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Meningkatnya kinerja perencanaan	Capaian kinerja program	83,70	83,70	81,83	81,83	84,00	85,38	87,00	93,73	90,00
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	70,43	70,43	78,69	78,69	79,47	79,55	80,27	82,35	81,07

Di tahun 2015 program dan kegiatan SKPD berpedoman pada RPJMD Perubahan 2011-2015, sehingga dalam 1 program SKPD hanya terdiri dari 1 indikator program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja program di 2015 adalah:

$$\text{Capaian kinerja program} = \frac{\text{jumlah persentase capaian program kabupaten}}{\text{jumlah program}}$$

$$= \frac{10.498 \%}{112}$$

$$= 93,73\%$$

Untuk capaian IKU SKPD presentase kesesuaian pemanfaatan ruang di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang} &= \frac{\text{luas pemanfaatan ruang sesuai RTRW}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{48.278,23 \text{ Ha}}{58.627,51 \text{ Ha}} \times 100\% \\ &= 82,35\% \end{aligned}$$

C. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Pada tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

- *Cakupan perencanaan tata ruang*

Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2014 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan Nanggulan. Selain itu Bappeda juga telah menyusun KLHS RDTRK Perkotaan Wates dan KLHS RDTRK Perkotaan Temon.

- *Capaian pengendalian tata ruang*

Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koordinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2015 dengan mengeluarkan 206 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 206 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

- *Capaian kesesuaian perencanaan program*

Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 100%. Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari 650 kegiatan di RKPD, terdapat 650 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.

- *Capaian tindak lanjut kerjasama*

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 75%. Pada tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas

Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY.

3. Urusan Statistik

- Cakupan ketersediaan data perencanaan*

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi/statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1 Meningkatnya kinerja perencanaan	2 Capaian kesesuaian perencanaan program	3 100	4 100
	Capaian tindak lanjut kerjasama	81,25	75
	Cakupan ketersediaan data perencanaan	81,82	81,82
2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	3 Cakupan perencanaan tata ruang	4 100	5 100
	Capaian pengendalian tata ruang	100	100

D. TARGET DAN REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan wilayah.

Target dan Realisasi SPM Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

No.	SPM	Satuan	Capaian Kinerja		
			2014	2015	Target
1	Informasi tata ruang (kabupaten)	%	100	100	100
2	Informasi tata ruang (kecamatan)	%	100	100	100
3	Informasi tata ruang (kelurahan/desa)	%	100	100	100

E. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berikut capaian IKK Bappeda Kulon Progo pada tahun 2015:

Target dan Realisasi IKK Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

No.	IKK	Satuan	Capaian Kinerja		
			2014	2015	Target
A. Urusan Penataan Ruang					
1	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	13,80	20	13,81
B. Urusan Perencanaan Pembangunan					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
C. Urusan Statistik					
1	Buku " kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
2	Buku " PDRB kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada

F. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 91,31% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 91,99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 88,82%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 (96,16%) disusul dengan program/kegiatan di sasaran ke-1 (90,87%).

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2015

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya kinerja perencanaan	Rp. 2.264.842.617,00	Rp. 2.058.051.787,00	90,87%
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Rp. 610.176.450,00	Rp. 586.720.625,00	96,16%
Jumlah		Rp. 2.875.019.067,00	Rp. 2.644.772.412,00	91,99%
Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD		Rp. 791.642.100,00	Rp. 703.122.875,00	88,82%
Total belanja langsung		Rp. 3.666.661.167,00	Rp. 3.347.895.287,00	91,31%

Realisasi anggaran untuk kedua sasaran berada di atas 90%, serta realisasi anggaran belanja langsung juga berada di atas 90%. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan anggaran sudah baik.

Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem informasi e-monev seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Realisasi Fisik, Keuangan, dan SDM Program Kegiatan Tahun 2015

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	SDM (orang)	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
URUSAN PENATAAN RUANG					
I	Program Perencanaan Tata Ruang	47.2671.000			
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	47.2671.000	51	100	97,02
II	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	137.505.450			
1	Koordinasi pemanfaatan ruang	137.505.450	33	100	93,18
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
I	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	229.524.250			
1	Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi	49.625.450	27	100	99,83
2	Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten	179.898.800	5	100	98,86
II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.345.958.067			
1	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	150.979.900	40	100	96,60
2	Penyusunan RKPD	195.053.050	36	100	94,57
3	Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya	104.971.850	46	100	90,03
4	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air	259312992	15	100	92,52
5	Penyusunan Data Dasar Spasial	14.933.750	12	100	98,91
6	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan	59.419.000	28	100	91,95
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24.762.275	21	100	91,98
8	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	182.975.100	81	100	94,21

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	SDM (orang)	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
9	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal	33.936.650	7	100	87,88
10	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	36.646.600	6	100	78,04
11	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan	39.650.000	6	100	76,57
12	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan	20.235.000	7	100	75,75
13	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup	30.319.900	6	100	72,13
14	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	39.829.800	14	100	87,86
15	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan	22.191.400	8	100	50,89
16	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum	60.340.800	11	100	71,58
17	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri	34.470.000	7	100	87,57
18	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs	19.930.000	20	100	80,76
19	Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	16.000.000	6	100	73,59
III	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	226.810.000			
1	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	47.580.000	4	100	97,92
2	Penyediaan Jasa keuangan	19.800.000	4	100	99,12
3	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	159.430.000	4	100	87,58
IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	514.865.000			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	262.195.000	4	100	98,00
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	252.670.000	4	100	75,63
V	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	29.000.000			
1	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	3.212.000	11	100	98,67
2	Penyusunan Laporan Keuangan	20.000.000	9	100	99,99
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	5.788.000	12	100	99,31

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	SDM (orang)	Realisasi (%)	
				Fisik	Keuangan
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD	20.967.100			
1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	10.000.000	4	100	95,00
2	Peningkatan Kemampuan Sendiri	1.818.100	4	100	92,04
3	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.149.000	5	100	99,97
URUSAN STATISTIK					
I	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	689.360.300			
1	Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	118.253.500	74	100	97,49
2	Penyusunan Data Keluarga Miskin	385.000.000	51	100	88,25
3	Penyusunan Data Statistik Daerah	186.106.800	56	100	92,87

PENUTUP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran kinerja menjadi instrumen di dalam manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan informasi pencapaian indikator kinerja, diharapkan SKPD dapat mengetahui prestasinya secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah seharusnya dapat diukur dan dievaluasi.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

LAMPIRAN I
CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2015

Kode	Urusan / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	SKPD	Capaian Kinerja Program 2015		
					Target	Realisasi	(%)
1	URUSAN WAJIB						
1.01	Pendidikan						
1.01.05	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Cakupan layanan PAUD	%	Dinas Pendidikan	55,98	56,20	100,39
1.01.06	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar	%	Dinas Pendidikan	89,34	86,28	96,57
1.01.07	Program Pendidikan Menengah	Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah	%	Dinas Pendidikan	97,89	95,21	97,26
1.01.08	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Capaian kinerja peningkatan mutu Guru	%	Dinas Pendidikan	79,88	80,16	100,34
1.01.09	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan	%	Dinas Pendidikan	92,36	92,98	100,66
1.01.10	Program Pendidikan Non Formal	Capaian kinerja pendidikan non formal	%	Dinas Pendidikan	81,04	94,76	116,92
1.01.11	Program Peningkatan Peran Serta Pelajar	Capaian peran serta pelajar	%	Dinas Pendidikan	85,57	86,71	101,33
1.02	Kesehatan						
1.02.05	Program Pelayanan Medis	Capaian pelayanan medis	%	Dinas Kesehatan	95,56	98,39	102,96
1.02.06	Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan	%	Dinas Kesehatan	93,65	100,00	106,78
1.02.07	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	Dinas Kesehatan	99,57	99,58	100,01
1.02.08	Program Pengembangan Kesehatan	Cakupan pengembangan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100,00	100,00	100,00
1.2.5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat	%	RSUD Wates	90,00	91,25	101,39
1.3	Pekerjaan Umum						
1.3.1	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	DPU	85,00	80,00	94,12
1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat	%	DPU	72,73	71,16	97,85
1.3.3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	Capaian ketersediaan air baku	%	DPU	97,05	95,95	98,87
1.3.4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Capaian peningkatan pelayanan irigasi	%	DPU	82,88	75,99	91,68
1.3.5	Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Capaian drainase pengairan dalam kondisi baik	%	DPU	35,97	35,21	97,89
1.3.6	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan	%	DPU	76,67	69,14	90,18
1.3.7	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan	%	DPU	58,94	64,35	109,17

Kode	Urusan / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	SKPD	Capaian Kinerja Program 2015		
					Target	Realisasi	(%)
1 3 8	Program Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum	Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	%	DPU	61,46	59,38	96,61
1 3 9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah	%	DPU	62,24	76,69	123,21
1 3 10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan layanan persampahan	%	DPU	38,71	32,97	85,16
1 3 11	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi	%	DPU	64,66	59,53	92,08
1 4	Perumahan						
1 4 1	Program pengembangan perumahan	Capaian peningkatan pelayanan perumahan	%	DPU	86,02	93,48	108,67
1 4 2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman	%	DPU	96,82	94,17	97,26
1 05	Penataan Ruang						
1 5 1	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan perencanaan tata ruang	%	Bappeda, DPU	100,00	100,00	100,00
1 5 3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Capaian pengendalian tata ruang	%	Bappeda, DPU	62,00	62,98	
1 6	Perencanaan Pembangunan						
1 6 1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian kesesuaian perencanaan program	%	Bappeda	100,00	100,00	100,00
1 6 2	Program Kerjasama Pengembangan IPTEK	Capaian tindak lanjut kerjasama	%	Bappeda	81,25	75,00	92,31
1 07	Perhubungan						
1 07 05	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan		%	Dinas Perhubungan dan Kominfo	95,25	100,33	105,33
1 07 06	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas	%	Dinas Perhubungan dan Kominfo	40,21	40,84	101,57
1 07 07	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	%	Dinas Perhubungan dan Kominfo	77,83	79,47	102,11
1 8	Lingkungan Hidup						
1 8 1	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam	%	Kantor Lingkungan Hidup	93,33	95,83	102,68
1 8 2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	%	Kantor Lingkungan Hidup	84,70	88,96	105,03
1 9	Pertanahan						
1 9 1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Capaian kinerja layanan pertanahan	%	Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)	75,09	73,25	97,55
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil						
1 10 05	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil	%	Dinas Dukcapil	97,70	98,04	100,35

Kode	Urusan / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	SKPD	Capaian Kinerja Program 2015		
					Target	Realisasi	(%)
1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1 11 01	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak	%	BPM PDPKB	64,48	74,50	115,54
1 11 02	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan	%	BPM PDPKB	37,24	49,20	132,14
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
1 12 01	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	%	BPM PDPKB	79,85	79,06	99,01
1 12 02	Program Keluarga Sejahtera	Cakupan pembinaan keluarga sejahtera	%	BPM PDPKB	38,16	50,83	133,21
1 13	Sosial						
1 13 01	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS	%	Dinas Sosnakertrans	35,81	38,65	107,92
1 13 02	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS	%	Dinas Sosnakertrans	69,23	74,15	107,11
1 14	Ketenagakerjaan						
1 14 05	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja	%	Dinas Sosnakertrans	89,29	86,95	97,38
1 14 06	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja	%	Dinas Sosnakertrans	87,50	91,02	104,02
1 14 07	Program Perlindungan Ketenagakerjaan	Capaian perlindungan ketenagakerjaan	%	Dinas Sosnakertrans	55,83	61,48	110,13
1 15	Koperasi dan UKM						
1 15 1	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Capaian jumlah koperasi aktif	%	Dinas Koperasi dan UMKM	92,78	93,37	100,63
1 15 2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Capaian peningkatan kualitas UMKM	%	Dinas Koperasi dan UMKM	96,91	111,90	115,47
1 16	Penanaman Modal						
1 16 1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan realisasi nilai investasi	%	Badan Penanaman Modal dan PT	91,15	210,41	230,85
1 16 2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Capaian peningkatan pelayanan perijinan	%	Dinas Koperasi dan UMKM	93,70	93,93	100,25
1 17	Kepemudaan dan Olahraga						
1 17 1	Program Pembinaan dan Pemasarkan Olahraga	Capaian pembinaan dan pemasarkan olahraga	%	Dinas Kebudparpora	100,00	70,29	70,29
1 17 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga	%	Dinas Kebudparpora	100	100	100,00
1 17 3	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	%	Dinas Kebudparpora	100,00	112,5	112,50
1 18	Kebudayaan						
1 18 1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pengembangan nilai budaya	%	Dinas Kebudparpora	84,87	216,20	254,74
1 18 2	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Capaian pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	%	Dinas Kebudparpora	91,78	87,60	95,45

Kode	Urusan / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	SKPD	Capaian Kinerja Program 2015		
					Target	Realisasi	(%)
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
1 19 1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	Sat Pol PP	82,65	98,41	119,07
		Capaian penanganan Bahaya Kebakaran	%	BPBD	38,53	58,53	151,91
1 19 2	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	%	Kantor Kesbangpol	100,00	100,00	100,00
1 19 3	Program Penanggulangan Dini Bencana	Capaian peningkatan penanggulangan bencana	%	BPBD	40,34	50,00	123,94
1 19 4	Program Tanggap Darurat Bencana	Cakupan penanganan bencana	%	BPBD	100,00	100,00	100,00
1 19 5	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	BPBD	100,00	100,00	100,00
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,						
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	Seluruh SKPD	80,00	80,00	100,00
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	Seluruh SKPD	84,22	100	118,74
	3 Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD	%	Seluruh SKPD	80,00	80,00	100,00
	4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	%	Seluruh SKPD	19,03	19,03	100,00
1 20 1	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH	Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH	%	Bag. Umum	80	80	100,00
1 20 2	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan	%	Bag. Adm. Kesra dan Kemasyarakatan	100	100	100,00
1 20 3	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Cakupan pengembangan e-Gov	%	Bagian TI dan Humas	82,52	75,85	91,92
1 20 4	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien	%	Bag. Organisasi	78,21	91,67	117,21
1 20 5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan publik	%	Bag. Organisasi	100,00	100,00	100,00
1 20 6	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	%	Bag. Kesra. Bag. Adm. Perekonominan, Bag. Adm. Pembangunan	100,00	100,00	100,00
1 20 7	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah	%	Bag Adm Pemerintahan Umum	100,00	100,00	100,00
1 20 8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah	%	Bag. Adm Pemerintahan Umum	100	100	100,00

Kode	Urusan / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	SKPD	Capaian Kinerja Program 2015		
					Target	Realisasi	(%)
1 20 9	Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	%	Bag. Adm Pemerintahan Umum	93,12	93,12	100,00
1 20 10	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan peraturan perundang-undangan yang disusun	%	Bagian Hukum	100	133,09	133,09
1 20 11	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Cakupan pelayanan bantuan hukum	%	Bagian Hukum	100	66,67	66,67
1 20 12	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	Bag Adm Pembangunan	100	120,91	120,91
1 20 13	Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank	Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik	%	Bagian Adm Perekonominan	95,02	95,02	100,00
1 20 14	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset	%	DPPKA	99,03	100,12	101,10
		Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah	%	Bag. Keuangan	100	100	100,00
1 20 15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	Badan Kepagawaian Daerah	93,72	93,29	99,54
1 20 16	Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur	Capaian peningkatan layanan kepegawaian	%	Badan Kepagawaian Daerah	100	100	100,00
1 20 17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Capaian peningkatan sistem pengawasan internal	%	Inspektorat daerah	38,31	40,54	105,80
1 20 18	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	Sekretariat DPRD	100,00	102,94	102,94
1 20 18	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	Kecamatan	87,55	90,30	103,14
1 20 20	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan	%	Kelurahan	45,94	45,94	100,00
1 21	Ketahanan Pangan						
1 21 1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Capaian peningkatan ketahanan pangan	%	KP4K	98,62	93,59	94,90
1 21 2	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani	%	KP4K	78,83	65,60	83,21
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1 22 05	Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa	%	BPMPDPKB	60,50	70,73	116,91
1 22 06	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa	%	BPMPDPKB	78,86	74,99	95,09
1 22 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Cakupan partisipasi masyarakat	%	BPMPDPKB	62,50	48,19	77,11
1 23	Statistik						
1 23 1	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik	Cakupan ketersediaan data perencanaan	%	Bappeda	81,82	81,82	100,00
1 24	Kearsipan						
1 24 1	Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Capaian pengelolaan kearsipan	%	Kantor Perpustakaan dan Arsip	67,76	83,64	123,44

Kode	Urusan / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	SKPD	Capaian Kinerja Program 2015		
					Target	Realisasi	(%)
1 25	Komunikasi dan Informatika						
1 25 01	Program Pengembangan Komunikasi Informasi	Capaian pengembangan komunikasi informasi	%	Dinas Perhubungan dan Kominfo	96,15	96,15	100,00
1 26	Perpustakaan						
1 26 1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Capaian layanan perpustakaan	%	Kantor Perpustakaan dan Arsip	42,34	45,01	106,31
2 01	Pertanian						
2 01 05	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan	%	Dinas Pertanian dan Kehutanan	100,00	95,24	95,24
2 01 06	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	%	Dinas Pertanian dan Kehutanan	93,15	105,86	113,65
2 01 07	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian	%	Dinas Pertanian dan Kehutanan	85,02	113,08	133,00
2 01 08	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Capaian produksi peternakan	%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	93,80	78,07	83,23
2 01 10	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan	%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	93,23	85,81	92,04
2 01 11	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan	%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	94,28	93,97	99,67
2 01 12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Capaian kesehatan ternak	%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	97,00	96,93	
2 02	Kehutanan						
2 02 1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	capaian peningkatan produksi hasil hutan	%	Dinas Pertanian dan Kehutanan	95,90	96,74	100,88
2 02 2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	cakupan rehabilitasi hutan dan lahan	%	Dinas Pertanian dan Kehutanan	98,48	99,30	100,82
2 03	Energi Sumber Daya Mineral						
2 03 01	Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan	Capaian pegusahaan dan pengawasan pertambangan	%	Dinas Perindag ESDM	97,10	97,10	100,00
2 03 02	Program Pengembangan Kegeologian dan Energi	Capaian pengembangan kegeologian dan Energi	%	Dinas Perindag ESDM	95,98	96,05	100,08
2 4	Pariwisata						
2 4 1	Program Pengembangan Pariwisata	Capaian peningkatan kunjungan wisatawan	%	Dinas Kebudparpora	93,95	820,51	873,31
2 05	Kelautan dan Perikanan						
2 05 05	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Capaian produksi ikan budidaya	%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	98,04	98,55	100,52
2 05 06	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Capaian produksi ikan tangkap	%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	96,31	70,40	73,10
2 05 07	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan	Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi	%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	94,79	97,75	103,12

Kode	Urusan / Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	SKPD	Capaian Kinerja Program 2015		
					Target	Realisasi	(%)
2 05 08	Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Capaian pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan	%	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	78,57	153,57	195,45
2 06	Perdagangan						
2 06 05	Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional	Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional	%	Dinas Perindag ESDM	36,65	38,86	106,01
2 06 06	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Capaian pengembangan usaha perdagangan	%	Dinas Perindag ESDM	91,62	111,96	122,20
2 07	Perindustrian						
2 07 01	Program Pengembangan Industri	Capaian pertumbuhan industri	%	Dinas Perindag ESDM	99,49	106,59	107,13
2 08	Ketransmigrasian						
2 08 01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Capaian penempatan transmigrasi	%	Dinas Sosnakertrans	100,00	60,00	60,00
					Jumlah Kinerja Program		10.498
					Jumlah Program		112
					Rata-rata Kinerja Program		93,73

LAMPIRAN II

PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2015

No.	Penilaian	Kesesuaian Lahan (Ha)	Pola Ruang (Ha)	%
1	Sesuai	48.278,23	58.628	82,35
2	Tidak sesuai	10.349,77	58.628	17,65

LAMPIRAN III

FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Capaian kesesuaian perencanaan program

$$= \frac{\left(\frac{\text{jumlah program RKPD sesuai RPJMD}}{\text{jumlah program RPJMD}} + \frac{\text{jumlah kegiatan APBD yang sesuai RKPD}}{\text{jumlah kegiatan RKPD}} \right)}{2} \times 100\%$$

2. Capaian tindak lanjut kerjasama

$$= \frac{\left(\frac{\text{jumlah kerjasama perguruan tinggi ditindaklanjuti}}{\text{jumlah kerjasama}} + \frac{\text{jumlah penghargaan yang diperoleh}}{\text{jumlah kejuaraan yang dikirim mewakili kabupaten}} \right)}{2} \times 100\%$$

3. Cakupan ketersediaan data perencanaan

$$= \frac{\text{jumlah data perencanaan yang tersusun}}{\text{jumlah data perencanaan yang harus ada}} \times 100\%$$

4. Cakupan perencanaan tata ruang

$$= \frac{\text{realisasi penyusunan dokumen perencanaan tata ruang}}{\text{jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan tata ruang}} \times 100\%$$

5. Capaian pengendalian tata ruang

$$= \frac{\text{jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang}}{\text{Jumlah permohonan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$$